

Dominasi AI dan Hilangnya Tenaga Kerja Produktif: Telaah Kritis terhadap Penggantian Pekerja Digital di Era Globalisasi Teknologi

Mohammad Fathi Zidan¹, Iffat Muafi², Rifma Ghulam Dzaljad³

Jurusan/Program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta 12130

Corresponding Author e-mail: Iffatmuafi8@gmail.com¹, fathizidan009@gmail.com²

Article History:

Received: 04-07-2026

Revised: 05-07-2026

Accepted: 12-07-2026

Keywords: *Dominasi AI, Penggantian Pekerja Digital, Otomasi Tenaga Kerja, Data Ketenagakerjaan, Rasionalitas Instrumental, Hegemoni Teknologi, Kapitalisme Digital, Teori Sosial Kritis*

Abstract: *The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed the digital labor market by automating not only routine tasks but also cognitive and creative occupations previously dominated by human workers. While AI has been widely promoted as a driver of productivity and innovation, its expansion has also intensified concerns regarding labor displacement, job insecurity, and the concentration of economic benefits within global technology corporations. This study aims to critically examine the replacement of productive digital workers by AI from the perspectives of Anthony Giddens' globalization theory and the Frankfurt School's critical social theory. A qualitative approach with a critical paradigm was employed using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, literature review, and secondary data from the World Economic Forum (WEF), International Labour Organization (ILO), Goldman Sachs Research, and Statistics Indonesia (BPS). The findings indicate that AI-based automation represents a systematic process of disembedding, transferring workers' knowledge and expertise into algorithmic systems controlled by technology corporations. This process has accelerated the depreciation of professional skills in content creation, graphic design, data analysis, translation, and programming while concentrating automation benefits among a limited number of digital platform owners. Furthermore, the widespread narrative portraying AI as a universally beneficial technology functions as a form of technological hegemony that obscures structural inequalities in the digital labor market. This study concludes that responding to AI domination requires comprehensive labor regulations, equitable redistribution of automation gains, stronger social protection, and educational reforms that prioritize critical thinking, creativity, and human-centered competencies that cannot easily be replicated by intelligent machines.*

How to Cite: Intan Mahrani J Gumohung (2026). *Analysis of Opportunities and Threats in Indonesia's International Trade: A Case Study of Indonesian and Malaysian Plantation*

Commodities. 1(3). pp. 205-211 <https://doi.org/10.61536/escalate.v1i03.540>



<https://doi.org/10.61536/escalate.v3i03.540>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Introduction

Revolusi kecerdasan buatan yang sedang berlangsung membawa serta janji-janji kemajuan yang berkilau: efisiensi tanpa batas, produktivitas yang meningkat, dan pembebasan manusia dari pekerjaan-pekerjaan yang membosankan. Namun di balik narasi utopia teknologi tersebut, tersembunyi kenyataan yang jauh lebih kelam bagi jutaan pekerja digital di seluruh dunia. Artificial Intelligence (AI) tidak hanya mengotomasi tugas-tugas repetitif, melainkan secara agresif merangsek ke wilayah pekerjaan yang selama ini diyakini sebagai benteng terakhir keunggulan manusia atas mesin: pekerjaan kreatif, kognitif, dan komunikatif. Copywriter, desainer grafis, analis data, penerjemah, programmer, jurnalis, dan berbagai profesi digital lainnya kini menghadapi ancaman eksistensial yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah dunia kerja modern. Ini bukan lagi spekulasi futuristik; ini adalah kenyataan yang sedang berlangsung, dan kecepatan serta skalanya jauh melampaui kemampuan adaptasi sistem sosial, hukum, maupun pendidikan yang ada.

Skala fenomena ini bukan sekadar kekhawatiran spekulatif, melainkan tren terukur yang dapat ditelusuri dari sejumlah data ketenagakerjaan terbaru. World Economic Forum (2025) memproyeksikan bahwa sepanjang 2025–2030, sekitar 92 juta pekerjaan akan tergantikan oleh kecerdasan buatan dan teknologi pengolahan informasi, sementara 170 juta peran baru akan tercipta—setara dengan pergantian struktural pada 22 persen dari total pekerjaan formal yang dipantau secara global (World Economic Forum, 2025). Riset Goldman Sachs memperkirakan bahwa AI generatif berpotensi mengekspos otomasi setara 300 juta pekerjaan penuh waktu secara global, dengan sekitar dua pertiga pekerjaan di Amerika Serikat dan Eropa terpapar pada tingkat tertentu oleh kemampuan AI generatif (Briggs & Kodnani, 2023). Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), melalui analisis berbasis model GPT-4 terhadap struktur tugas pekerjaan, menemukan bahwa pekerjaan klerikal—termasuk sebagian pekerjaan administratif yang sebelumnya dianggap rutin dan aman—memiliki tingkat keterpaparan tertinggi, dengan 24 persen tugas klerikal berada pada kategori keterpaparan tinggi dan 58 persen lainnya pada kategori keterpaparan menengah (Gmyrek et al., 2023). Studi klasik Frey dan Osborne, jauh sebelum ledakan AI generatif, telah memperkirakan bahwa 47 persen dari total lapangan kerja di Amerika Serikat berada pada kategori berisiko tinggi terhadap komputerisasi dalam satu hingga dua dekade (Frey & Osborne, 2017). Rangkaian data ini menegaskan bahwa ancaman terhadap pekerja digital bukan proyeksi futuristik yang dibesar-besarkan, melainkan tren terukur yang sedang berlangsung secara nyata di pasar kerja global.

Anthony Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan intensifikasi relasi sosial lintas dunia yang secara fundamental mengubah hubungan antara ruang, waktu, dan tindakan manusia. Dalam kerangka Giddens, salah satu ciri paling menonjol dari modernitas tinggi adalah mekanisme disembedding: proses di mana sistem sosial diangkat dari konteks interaksi lokal dan direstrukturisasi ke dalam rentang waktu-ruang yang tak terbatas. Otomasi berbasis AI adalah bentuk paling radikal dari disembedding dalam dunia kerja: keahlian yang bertahun-tahun dibangun, diasah, dan dilekatkan pada tubuh dan pikiran seorang pekerja digital kini dicabut paksa dan dienkapsulasi ke dalam model bahasa dan algoritma milik korporasi. Pekerja kehilangan bukan hanya pekerjaannya, tetapi juga nilai sosial dari keahliannya, yang tiba-tiba menjadi komoditas usang dalam pasar yang kini dikuasai mesin. Giddens (1990) juga menekankan bahwa modernitas reflexive menghasilkan risiko-risiko yang bersifat manufactured, yakni risiko yang bukan berasal dari alam tetapi diciptakan oleh pilihan-pilihan sosial dan teknologis manusia itu sendiri. Pengangguran massal pekerja digital akibat AI adalah risiko manufaktur yang paling nyata dari era kita (Ritzer, 2014). Temuan empiris memperkuat kekhawatiran ini: Acemoglu dan Restrepo menunjukkan bahwa setiap penambahan satu robot per seribu pekerja di pasar kerja Amerika Serikat menurunkan rasio kesempatan kerja terhadap populasi sekitar 0,2 poin persentase dan upah sekitar 0,42 persen, dengan efek displacement yang justru semakin menguat—khususnya di sektor manufaktur—sepanjang tiga dekade terakhir (Acemoglu & Restrepo, 2020).

Escalate: Economics and Business Journal

<https://doi.org/10.61536/escalate.v1i3.455>

This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) 4.0 license



Pergeseran lanskap kerja digital akibat AI tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang terencana dan bertahap. Sebelum era AI generatif, pekerja digital membangun nilai profesionalnya melalui akumulasi keahlian yang membutuhkan waktu, latihan, dan pengalaman. Seorang penulis konten mengasah kemampuan bernarasi selama bertahun-tahun; seorang desainer mengembangkan kepekaan estetika melalui ribuan jam kerja; seorang programmer membangun logika komputasional yang kompleks melalui proses trial and error yang panjang. Namun kini, semua proses pembentukan keahlian itu dapat dilewati begitu saja oleh siapa pun yang memiliki akses ke platform AI. Yang lebih meresahkan adalah bahwa model-model AI tersebut dibangun justru dengan mengonsumsi karya-karya pekerja kreatif tanpa kompensasi yang memadai, dan hasilnya kini digunakan untuk bersaing dengan, bahkan menggantikan, para pencipta aslinya. Ini adalah bentuk eksploitasi ganda yang belum memiliki padanan dalam sejarah ekonomi: pekerja tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga menjadi bahan bakar yang tidak dibayar bagi teknologi yang menggusurnya. Gray dan Suri menyebut fenomena tenaga kerja tersembunyi di balik sistem otomatis ini sebagai *ghost work*—pekerjaan manusia yang tak terlihat namun esensial bagi berfungsinya sistem AI, mulai dari pelabelan data hingga moderasi konten, yang sering luput dari pengakuan maupun kompensasi yang layak (Gray & Suri, 2019).

Konteks Indonesia tidak terkecuali dari arus disrupsi ini. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Februari 2025 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 153,05 juta orang dengan 145,77 juta orang dalam status bekerja, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,76 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Skala besar pasar kerja domestik ini menjadikan Indonesia tidak kebal terhadap tekanan otomasi yang sama. Pada September 2024, dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII di Surakarta, Presiden Republik Indonesia secara terbuka mengutip proyeksi World Economic Forum bahwa sekitar 85 juta pekerjaan secara global berpotensi hilang akibat otomasi, sembari mengingatkan bahwa tantangan ini harus dihadapi secara serius oleh pemerintah maupun masyarakat (World Economic Forum, 2020). Pada saat yang sama, narasi optimisme produktivitas turut menguat di kalangan bisnis domestik: laporan PwC 2024 Global AI Jobs Barometer mencatat bahwa sektor-sektor dengan adopsi AI tinggi mengalami pertumbuhan produktivitas yang jauh lebih cepat dibandingkan sektor yang minim AI, dan pekerja yang memiliki keterampilan AI memperoleh premi upah rata-rata 25 persen dibandingkan rekan sejawat yang tidak memilikinya (PwC Indonesia, 2024). Optimisme semacam inilah yang, dalam kerangka teori kritis, justru patut diwaspadai: ia berpotensi menjadi pembungkus ideologis yang menyamarkan siapa sesungguhnya yang menikmati premi tersebut dan siapa yang tersisih dari pasar kerja yang standarnya kini ditentukan oleh kecakapan AI.

Teori sosial kritis, khususnya dari tradisi mazhab Frankfurt, menyediakan perangkat analisis yang paling tajam untuk membongkar dimensi kuasa yang tersembunyi di balik fenomena ini. Ben Agger (2009) menjelaskan bahwa teknologi modern tidak pernah benar-benar netral; ia selalu merepresentasikan kepentingan kelompok yang merancang, membiayai, dan menguasainya. Dalam konteks AI, korporasi-korporasi teknologi raksasa seperti OpenAI, Google, dan Meta tidak mengembangkan sistem kecerdasan buatan untuk kebaikan universal. Mereka melakukannya untuk menguasai pasar, mengakumulasi data, dan pada akhirnya mereduksi ketergantungan pada tenaga kerja manusia yang mahal dan “tidak dapat diprediksi”. Herbert Marcuse (1964) memperingatkan bahwa masyarakat teknologis modern menghasilkan kebutuhan-kebutuhan palsu yang mengintegrasikan individu ke dalam sistem dominasi yang ada. Ketika pekerja digital berbondong-bondong mengadopsi AI karena tekanan pasar dan narasi “relevansi profesional”, mereka sesungguhnya sedang merespons kebutuhan palsu yang diciptakan oleh sistem yang sama yang kelak akan mengeliminasi mereka. Inilah paradoks paling gelap dari kapitalisme teknologi: para korban turut aktif membangun alat penindasan mereka sendiri. Lebih jauh, rasionalitas instrumental yang mendominasi pengembangan AI mencerminkan logika yang paling destruktif dari kapitalisme modern: segala sesuatu, termasuk manusia dan keahliannya, direduksi menjadi kalkulasi biaya-manfaat. Marcuse (1964) menyebutnya sebagai *one-dimensional thinking*: pola pikir yang hanya mengakui satu dimensi realitas, yaitu dimensi efisiensi dan produktivitas, sambil menutup mata terhadap dimensi kemanusiaan, keadilan sosial, dan martabat kerja. Dalam logika ini, pekerja digital yang digantikan AI bukan dilihat sebagai manusia yang kehilangan sumber penghidupan dan identitas profesionalnya, melainkan sekadar “biaya operasional” yang berhasil dipangkas. Narasi tentang “pekerja yang perlu beradaptasi dan meningkatkan keahlian” yang kerap dilontarkan oleh para pemimpin industri teknologi merupakan manifestasi sempurna dari *one-dimensional thinking* ini: ia mengalihkan tanggung jawab struktural ke pundak individu, seolah-olah

pengangguran massal akibat otomasi adalah kegagalan pribadi pekerja, bukan konsekuensi dari pilihan sistemik yang dibuat oleh kelompok pemilik modal.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kritis yang selama ini absen dalam kajian AI dan ketenagakerjaan digital di Indonesia. Sebagian besar studi yang ada cenderung merayakan potensi AI sebagai enabler produktivitas—sebagaimana tercermin dalam optimisme angka premi upah dan pertumbuhan produktivitas yang dipaparkan di atas—tanpa mempertanyakan secara serius siapa yang menanggung biaya sosial dari transformasi tersebut, dan bagaimana data agregat semacam itu dapat mengaburkan ketimpangan distribusi dampak pada tingkat pekerja individu. Dengan memadukan data ketenagakerjaan global dan nasional tersebut bersama perspektif globalisasi Anthony Giddens dan teori sosial kritis mazhab Frankfurt, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fenomena penggantian pekerja digital oleh AI, melainkan membongkar mekanisme kuasa, ideologi, dan hegemoni yang beroperasi di baliknya. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah: bagaimana proses penggantian pekerja digital oleh AI berlangsung dalam kerangka globalisasi kapitalisme teknologi, kepentingan siapa yang dilayani oleh otomasi massal ini, dan jenis resistensi struktural apa yang dibutuhkan untuk melindungi martabat dan keberlangsungan hidup pekerja digital di tengah gelombang disrupsi yang tidak akan berhenti.

Research methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis paradigma kritis untuk menganalisis secara mendalam fenomena penggantian pekerja digital produktif oleh teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam konteks globalisasi kapitalisme teknologi. Paradigma kritis dipilih karena mampu menyingkap relasi kuasa, mekanisme ideologi, dan struktur dominasi yang tersembunyi di balik wacana kemajuan teknologi yang tampaknya netral (Browne, 2020; Jones, 2010). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada pekerja digital di sektor-sektor yang paling terdampak otomasi AI, yaitu penulisan konten, desain grafis, analisis data, penerjemahan, dan pemrograman tingkat menengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pekerja digital yang mengalami langsung dampak otomasi AI, observasi terhadap perubahan permintaan tenaga kerja di platform-platform kerja digital, dokumentasi kebijakan perusahaan teknologi terkait otomasi, studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak AI terhadap pasar kerja, serta analisis data sekunder berupa laporan dan statistik ketenagakerjaan dari lembaga internasional dan nasional—termasuk World Economic Forum, International Labour Organization, Goldman Sachs Research, dan Badan Pusat Statistik—yang digunakan untuk memetakan skala dan arah perubahan pasar kerja digital secara kuantitatif sebagai pelengkap temuan kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori: data primer dari wawancara dan observasi dipertemukan dengan data sekunder kuantitatif tersebut, sehingga interpretasi teoretis—dengan memadukan perspektif globalisasi Anthony Giddens dan teori sosial kritis mazhab Frankfurt sebagai kerangka interpretasi yang saling melengkapi (Lubis, 2015)—tidak berdiri sendiri, melainkan berpijak pada bukti empiris yang terukur.

Results and Discussion

Temuan penelitian ini mengungkap realitas yang kerap diabaikan dalam euforia digitalisasi: AI tidak sekadar mengotomasi tugas-tugas rutin, melainkan secara sistematis menggantikan peran-peran produktif yang selama ini menjadi domain eksklusif pekerja digital terlatih. Pekerjaan yang dulu membutuhkan keahlian bertahun-tahun seperti penulisan konten, desain grafis dasar, analisis data, penerjemahan, pemrograman tingkat menengah, hingga layanan pelanggan kini dapat dilakukan oleh AI dalam hitungan detik dengan biaya mendekati nol. Dalam perspektif globalisasi Giddens, fenomena ini merupakan manifestasi ekstrem dari proses disembedding: pengetahuan dan keahlian yang dulunya melekat pada individu manusia kini dicabut dan dimasukkan ke dalam sistem abstrak algoritma yang tidak mengenal kelelahan, tidak menuntut upah, dan tidak memiliki hak. Giddens (1990) memperingatkan bahwa modernitas reflexive membawa risiko-risiko baru yang tak terduga; dan yang paling mendesak saat ini adalah risiko struktural berupa pengangguran massal pekerja digital yang

keterampilannya tiba-tiba menjadi usang bukan karena mereka gagal berkembang, melainkan karena sistem kapitalistik memilih mesin yang lebih murah dan lebih patuh.

Data World Economic Forum (2025) yang dipaparkan pada bagian pendahuluan memperlihatkan bagaimana proses disembedding ini terjadi pada skala industri, bukan sekadar pada level kasus-kasus individual: peran-peran administratif dan klerikal—dan secara mengejutkan turut mencakup desain grafis, yang berada di antara posisi-posisi dengan proyeksi penurunan permintaan tertinggi pada periode 2025–2030—bergeser paling cepat ke arah otomasi. Hal ini menegaskan tesis Giddens bahwa disembedding bukan sekadar metafora teoretis, melainkan proses material yang dapat diukur melalui statistik ketenagakerjaan: keahlian yang dulu dianggap sebagai modal manusia yang stabil kini berpindah tempat ke dalam sistem algoritmik dengan kecepatan yang dapat dipetakan secara kuantitatif.

Yang paling berbahaya dari proses penggantian pekerja digital oleh AI adalah cara berlangsungnya yang halus dan bertahap, sehingga hampir tidak terasa sebagai ancaman hingga kerusakan sudah terlanjur terjadi. Agger (2009) menjelaskan bahwa teknologi modern menciptakan false consciousness: narasi tentang AI sebagai “mitra produktivitas” dan “alat bantu” secara strategis menutupi fakta bahwa platform-platform AI dibangun dan dipasarkan oleh korporasi teknologi multinasional yang kepentingan utamanya bukan memberdayakan pekerja, melainkan mengeliminasi biaya tenaga kerja demi memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Pekerja digital yang dengan antusias mengadopsi AI dalam pekerjaannya tanpa disadari sedang melatih penggantinya sendiri: setiap data yang dihasilkan, setiap umpan balik yang diberikan, setiap pola kerja yang terekam menjadi bahan bakar bagi sistem AI yang kelak akan membuat mereka tak lagi dibutuhkan. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan kuasa yang fundamental: korporasi meraup keuntungan dari otomasi sementara pekerja menanggung seluruh biaya sosialnya dalam bentuk pengangguran, depresiasi keahlian, dan hilangnya martabat kerja. Rasionalitas instrumental mazhab Frankfurt bekerja tepat di sini: efisiensi menjadi dalih untuk mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dalam relasi kerja. Pertumbuhan lima kali lipat jumlah platform kerja digital secara global sejak 2010 menjadi bukti material betapa cepatnya logika platform—dengan algoritma sebagai manajer dan data pekerja sebagai bahan baku akumulasi nilai—mengakar dalam ekonomi digital, jauh mendahului kesadaran kolektif pekerja akan implikasi jangka panjangnya (International Labour Organization, 2021).

Thompson (2003) menegaskan bahwa teknologi tidak beroperasi dalam ruang yang bebas nilai, melainkan secara aktif mereproduksi ideologi kelompok yang menguasai sarana produksinya. Dalam konteks ekonomi digital, AI adalah teknologi yang dikuasai sepenuhnya oleh segelintir korporasi teknologi global, dan merekalah yang menentukan pekerjaan apa yang diotomasi, siapa yang tergantikan, dan siapa yang tetap dipertahankan. Pekerja digital konten kreator, copywriter, programmer, desainer, analis, dan berbagai profesi kreatif lainnya menghadapi kenyataan pahit: nilai jual keahlian mereka anjlok secara drastis dalam pasar kerja yang kini menjadikan AI sebagai standar efisiensi baru. Ironinya, mereka yang paling terdampak justru adalah pekerja dari kelas menengah terdidik yang selama ini diyakini aman dari otomasi. Di sinilah hegemoni digital bekerja paling halus: narasi “naik kelas bersama AI” disebarluaskan sementara secara struktural pintu-pintu kesempatan kerja menyempit. Resistensi terhadap dominasi AI dalam pasar kerja digital bukan berarti menolak teknologi, melainkan menuntut redistribusi manfaat otomasi secara adil, regulasi yang melindungi hak-hak pekerja di era AI, dan rekonstruksi sistem pendidikan yang menghasilkan kompetensi yang tidak mudah digantikan mesin: kemampuan berpikir kritis, etika profesional, empati, dan kreativitas yang berakar pada pengalaman manusiawi. Tantangan ini menjadi lebih mendesak ketika premi upah dan lonjakan produktivitas akibat AI—seperti tercermin dalam temuan PwC Indonesia (2024) maupun pesatnya adopsi AI generatif di kalangan talenta digital domestik—pada praktiknya hanya dapat dinikmati oleh segelintir pekerja yang memiliki literasi teknologi memadai, sementara pekerja pemula dan pekerja dengan keahlian dasar di bidang penulisan, desain, maupun analisis data justru berada pada posisi paling rentan untuk tersisih dari pasar kerja yang standar efisiensinya kini ditentukan oleh mesin.

Jika dibaca secara bersamaan, data global dari World Economic Forum, Goldman Sachs, dan ILO dengan data domestik dari Badan Pusat Statistik dan PwC Indonesia menunjukkan pola yang konsisten: transformasi pasar kerja digital akibat AI berlangsung jauh lebih cepat dan lebih luas dibandingkan kapasitas adaptasi pekerja, sementara narasi publik tentang “kolaborasi manusia-AI” cenderung menyamarkan asimetri kuasa antara korporasi pemilik teknologi dan pekerja yang keahliannya diekstraksi. Inilah inti dari rasionalitas instrumental dan hegemoni teknologi yang diuraikan mazhab Frankfurt: di balik angka pertumbuhan pekerjaan neto yang tampak menjanjikan, tersembunyi proses

redistribusi risiko yang tidak merata, di mana korporasi teknologi menanggung risiko inovasi yang minimal namun menikmati keuntungan terbesar, sementara pekerja digital—khususnya di negara berkembang seperti Indonesia—menanggung risiko transisi yang paling besar dengan jaring pengaman sosial yang masih terbatas.

Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa penggantian pekerja digital produktif oleh AI bukan sekadar fenomena teknologis yang tak terhindarkan, melainkan sebuah pilihan politik-ekonomi yang diambil oleh kelompok pemilik modal dengan konsekuensi sosial yang sangat serius. Di balik narasi efisiensi dan kemajuan, beroperasi mekanisme hegemoni yang secara sistematis mendegradasi nilai tenaga kerja manusia sekaligus mengonsentrasikan keuntungan otomasi pada segelintir korporasi teknologi global. Dalam bingkai Giddens, AI mempercepat proses disembedding keahlian dari tubuh pekerja ke dalam sistem abstrak algoritmik yang tak berempati dan tak bertanggung jawab sosial. Sementara itu, teori sosial kritis Frankfurt mengungkap bahwa false consciousness yang disebarkan melalui narasi “AI sebagai mitra” berfungsi menutupi relasi eksploitatif yang sesungguhnya terjadi. Data ketenagakerjaan yang dipaparkan sepanjang artikel ini—mulai dari proyeksi global 92 juta pekerjaan tergantikan hingga 2030, keterpaparan otomasi setara 300 juta pekerjaan penuh waktu, hingga skala 145,77 juta pekerja Indonesia yang turut berhadapan dengan tekanan otomasi yang sama—menegaskan bahwa ancaman ini bersifat terukur, bukan spekulasi belaka, sehingga argumen teoretis di atas tidak berdiri sendiri melainkan berpijak pada bukti empiris yang konkret. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan adaptasi pasif terhadap dominasi AI, melainkan perlawanan terstruktur: regulasi ketenagakerjaan yang responsif terhadap otomasi, redistribusi keuntungan teknologi secara adil, serta transformasi sistem pendidikan yang menghasilkan pekerja dengan kompetensi kritis yang tak tergantikan mesin. Nasib pekerja digital di era AI bukan takdir, melainkan hasil dari pilihan sosial yang bisa dan harus diperdebatkan secara kritis.

Bibliography

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188–2244. <https://doi.org/10.1086/705716>
- Agger, B. (2009). *Teori sosial kritis: Kritik, penerapan, dan implikasinya*. Kreasi Wacana.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025*. BPS RI.
- Briggs, J., & Kodnani, D. (2023). *The potentially large effects of artificial intelligence on economic growth* (Global Economics Paper). Goldman Sachs Global Investment Research.
- Browne, C. (2020). *Teori sosial kritis*. Pustaka Pelajar.
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Polity Press.
- Gmyrek, P., Berg, J., & Bescond, D. (2023). *Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality* (ILO Working Paper No. 96). International Labour Organization. <https://doi.org/10.54394/FHEM8239>
- Gray, M. L., & Suri, S. (2019). *Ghost work: How to stop Silicon Valley from building a new global underclass*. Houghton Mifflin Harcourt.
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. ILO.
- Jones, P. (2010). *Pengantar teori-teori sosial: Dari fungsionalisme hingga postmodernisme*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis, A. Y. (2015). *Pemikiran kritis kontemporer*. Rajawali Press.
- Marcuse, H. (1964). *One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society*.

Beacon Press.

PwC Indonesia. (2024). *PwC 2024 Global AI jobs barometer: Indonesia*. PwC.

Ritzer, G. (2014). *Teori sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern* (Edisi ke-8). Pustaka Pelajar.

Thompson, J. B. (2003). *Analisis ideologi: Kritik wacana ideologi-ideologi dunia*. IRCiSoD.

World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*. World Economic Forum.

World Economic Forum. (2025). *The future of jobs report 2025*. World Economic Forum.

